

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

- TEMA** : **Kondisi Kebebasan Ekonomi di Indonesia dan Dampaknya Bagi Lingkungan**
- Pemateri** :
1. **Nailul Huda** – Direktur Ekonomi Digital, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
 2. **Putu Rusta Adijaya** – Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute
 3. **Anggi Pertiwi Putri** – Perencana Ahli Muda, Koordinator Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Bappenas
 4. **Lishia Erza** – APINDO
- Moderator** : Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Pada hari Kamis, 27 November 2025, The Indonesian Institute (TII) menyelenggarakan diskusi TIF Seri ke 126 yang berfokus pada arah pembangunan ekonomi Indonesia dengan penekanan khusus pada agenda ekonomi hijau dan tantangan implementasinya. Diskusi ini juga merupakan bagian dari diseminasi hasil riset bidang ekonomi oleh Putu Rusta Adijaya selaku Peneliti Bidang Ekonomi TII. Diskusi ini menyoroti bagaimana transisi ekonomi nasional tidak bisa lagi bertumpu pada sektor-sektor ekstraktif, melainkan harus bergeser menuju aktivitas yang lebih berkelanjutan, termasuk dekarbonisasi industri. Para peneliti TII menekankan bahwa pendekatan ekonomi hijau bukan hanya wacana normatif, melainkan prasyarat penting untuk memastikan daya saing nasional dalam jangka panjang.

Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa Bappenas telah memperkenalkan Indeks Ekonomi Hijau pada gelaran G20 di Bali tahun 2022 sebagai alat ukur kinerja pembangunan yang lebih komprehensif. Indeks ini menggabungkan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk memberikan gambaran utuh mengenai arah pertumbuhan Indonesia. Namun, peserta diskusi sepakat bahwa intervensi di aspek lingkungan perlu diperkuat secara signifikan. Indikator lingkungan—seperti tutupan hutan, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan sampah, penurunan emisi, hingga kondisi lahan gambut terdegradasi—dinilai masih jauh dari ideal dan menuntut komitmen kebijakan yang lebih tegas.

Upaya penguatan rule of law dipandang sebagai fondasi penting bagi keberhasilan agenda ekonomi hijau. Diskusi menyoroti perlunya peningkatan standar dan penegakan hukum lingkungan, harmonisasi regulasi lintas sektor, pengelolaan tata ruang yang lebih ketat, serta integrasi sistem MRV (measurement, reporting, verification) dalam seluruh sektor terkait. Penguatan tata kelola data juga menjadi sorotan karena kebijakan berbasis bukti tidak dapat dilakukan tanpa sistem informasi yang transparan dan akurat. Selain itu, peserta diskusi menilai bahwa reformasi hukum harus diiringi dengan integritas implementasi agar kebijakan tidak berhenti pada dokumen perencanaan semata.

Dalam pemaparannya, Lishia menekankan perlunya membangun sistem kelembagaan yang tidak membebani birokrasi. Menurutnya, ekonomi hijau hanya dapat berkembang jika institusi pemerintah lebih adaptif dan menyediakan penghargaan (rewarding) bagi pelaku usaha yang sudah mulai menerapkan prinsip keberlanjutan. Ia

menambahkan bahwa inovasi hijau di sektor UMKM perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah, terutama bagi usaha yang bergerak di bidang iklim dan keberlanjutan yang seringkali tidak mendapatkan dukungan struktural.

Pada bagian lain diskusi, Huda memaparkan kondisi makroekonomi Indonesia yang menunjukkan perlambatan, termasuk dalam konsumsi rumah tangga bahkan pada periode Lebaran sekalipun. Fenomena ini dianggap sebagai sinyal bahwa kinerja perekonomian belum berjalan optimal. Ia juga menggarisbawahi bahwa selama era pemerintahan Jokowi, sektor pertambangan justru menunjukkan tren peningkatan signifikan seiring dengan kebijakan hilirisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi agenda ekonomi hijau, karena ketergantungan pada sektor tambang berpotensi memperbesar jejak karbon nasional.

Huda menambahkan bahwa peran Indonesia dalam perdagangan global masih sangat rendah, hanya berkontribusi sekitar 0,93 persen. Minimnya keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global dapat menjadi hambatan sekaligus peluang—jika Indonesia mampu memperkuat produk hijau yang memiliki nilai tambah. Namun untuk itu, stabilitas kebijakan dan kepastian hukum menjadi faktor yang sangat menentukan.

Dalam sesi tanya jawab, perwakilan Bappenas menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Menurut Bappenas, pengawasan yang kuat harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak “ugal-ugalan” dan tidak menimbulkan dampak sosial maupun ekologis yang merugikan masyarakat. Bappenas juga mengakui bahwa persoalan tata kelola, integritas, dan kepatuhan regulasi masih menjadi tantangan terbesar dalam implementasi agenda hijau.

Diskusi kemudian berkembang pada refleksi mengenai ketimpangan pelaku ekonomi di Indonesia. Para peserta mencatat bahwa perjalanan ekonomi nasional selama ini cenderung menyamakan kebutuhan antara usaha kecil, menengah, dan besar, padahal masing-masing memiliki spektrum kapasitas dan tantangan yang berbeda. Penyamaan perlakuan kebijakan ini seringkali menghambat UMKM untuk naik kelas, terutama dalam konteks adopsi teknologi hijau yang membutuhkan investasi awal tidak sedikit.

Pada sesi penutup, Huda kembali menekankan bahwa problem utama bukan pada kurangnya rencana atau visi. Pemerintah dinilai cukup baik dalam merumuskan strategi pembangunan dan dokumen kebijakan. Namun, pelaksanaannya kerap jauh dari harapan. Ia mencontohkan berbagai inkonsistensi seperti komitmen di COP30 yang tidak sejalan dengan praktik di lapangan, pembangunan fasilitas pemerintah yang menggusur lahan mangrove, atau kasus Raja Ampat yang justru rusak oleh aktivitas pembangunan. Hal-hal tersebut memperlihatkan kesenjangan besar antara ambisi dan implementasi.

Secara keseluruhan, diskusi TII pada 27 November 2025 ini menegaskan bahwa agenda ekonomi hijau di Indonesia memiliki fondasi kebijakan yang cukup kuat, namun masih menghadapi tantangan besar dari sisi tata kelola, penegakan hukum, konsistensi antar-regulasi, serta kapasitas implementasi. Para peserta sepakat bahwa keberhasilan transisi ekonomi hijau sangat bergantung pada political will, integritas birokrasi, dan kemampuan pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Jika tantangan ini tidak ditangani secara serius, maka ekonomi hijau hanya akan menjadi slogan, bukan arah pembangunan yang sesungguhnya.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.*

TERIMA KASIH ~